

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, serta batasan penelitian. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah dan fokus kajian yang dilakukan.

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi (TI) dan transformasi digital saat ini telah menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat efisiensi organisasi, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Menurut Bagja et al. (2024) penggunaan TI yang efektif di sektor publik dapat mempercepat pengambilan keputusan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memperkuat akuntabilitas pelayanan pemerintahan. Namun demikian, Almunawar et al. (2012) mengingatkan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap TI juga memperbesar risiko kegagalan sistem, pelanggaran keamanan data, serta tantangan dalam mematuhi regulasi yang semakin kompleks.

Dalam tataran global, Ahmed & Manoharan (2017) menunjukkan bahwa negara-negara maju seperti Singapura, Malaysia, dan beberapa negara Eropa telah berhasil mengadopsi kerangka kerja tata kelola TI seperti COBIT 2019 untuk meningkatkan efektivitas sektor publik mereka. Integrasi *framework* ini terbukti mampu menyelaraskan strategi TI dengan visi nasional, memperbaiki efisiensi pelayanan publik, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Penerapan tata kelola TI yang terstruktur mendorong pengelolaan risiko yang lebih baik serta penggunaan TI yang lebih strategis dalam pelayanan publik.

Di Indonesia, upaya penguatan tata kelola TI difasilitasi melalui peluncuran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 (Kementerian PANRB, 2018). SPBE bertujuan mengintegrasikan berbagai *framework* seperti COBIT 5, ITIL, dan *Enterprise Architecture* untuk mendukung digitalisasi sektor publik (Kementerian PANRB, 2018). Di tingkat daerah, implementasi SPBE menjadi tanggung jawab penting instansi seperti

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), termasuk di Kota Bandung yang menjadi salah satu daerah pelopor dalam digitalisasi pemerintahan daerah. Namun, studi oleh Komarudin et al. (2025) mengungkapkan bahwa implementasi SPBE di banyak instansi pemerintah, termasuk Diskominfo daerah, belum optimal. Hambatan utama meliputi kurangnya pemahaman tentang prinsip tata kelola TI, ketidaksesuaian antara strategi organisasi dan proses TI, serta keterbatasan dalam memastikan kepatuhan regulasi. Rendahnya tingkat *awareness* terhadap *framework governance* seperti COBIT menjadi faktor krusial yang menghambat efektivitas penerapan SPBE.

Dalam sektor publik, pentingnya tata kelola TI semakin menonjol karena erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya publik dan akuntabilitas layanan. Enrique & Fianty (2023) menekankan bahwa *framework* seperti COBIT dirancang untuk mengelola TI secara efektif, menyelaraskan strategi TI dengan tujuan organisasi, serta meningkatkan transparansi dan pengelolaan risiko. Sayangnya, dalam banyak kasus, rendahnya tingkat pemahaman dan keterlibatan *stakeholder* menyebabkan implementasi *framework* ini hanya bersifat administratif tanpa memberikan dampak nyata terhadap performa layanan.

Penelitian oleh Wibowo & Herdiansyah (2024) menunjukkan bahwa meskipun COBIT 5 telah diadopsi secara formal di berbagai instansi tingkat pemahaman pegawai terhadap prinsip-prinsip dasarnya masih rendah. Banyak pegawai dan pimpinan belum memahami bagaimana prinsip *governance* diterjemahkan dalam konteks operasional sehari-hari. Hal ini menyebabkan lemahnya integrasi TI dengan perencanaan strategis organisasi, rendahnya efektivitas pengelolaan risiko TI, serta sub optimalnya pengelolaan investasi teknologi.

Sebagai respons terhadap kebutuhan akan tata kelola yang lebih adaptif, ISACA Organization (2018) memperkenalkan COBIT 2019 sebagai pembaruan dari *framework* sebelumnya. COBIT 2019 memperkenalkan konsep *Design Factors* dan *Focus Areas* yang memberikan fleksibilitas lebih dalam menyesuaikan *governance* dengan konteks dan prioritas strategis organisasi. *Framework* ini juga lebih responsif terhadap dinamika perubahan teknologi, regulasi, serta kebutuhan spesifik sektor publik dan sektor swasta.

Transisi dari COBIT 5 ke COBIT 2019 memberikan peluang besar bagi instansi pemerintah, termasuk Diskominfo Kota Bandung, untuk memperkuat kapabilitas tata kelola TI mereka. Namun, keberhasilan transisi ini bergantung pada kesiapan organisasi, terutama dalam membangun kesadaran internal (*awareness*), meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mengintegrasikan prinsip tata kelola TI ke dalam budaya dan proses kerja organisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat *awareness* dan kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan COBIT 2019 sebagai pengembangan dari COBIT 5 di lingkungan Diskominfo Kota Bandung. Penelitian ini akan menganalisis tantangan yang berkaitan dengan *awareness*, kesiapan transisi *framework*, serta memberikan rekomendasi berbasis analisis kesenjangan untuk memperbaiki praktik tata kelola TI, guna memperkuat efektivitas pelayanan publik berbasis elektronik di Kota Bandung, sekaligus memberikan pembelajaran bagi instansi serupa di tingkat nasional.

I.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tingkat *awareness* pegawai di *Diskominfo* Kota Bandung terhadap prinsip-prinsip tata kelola TI berbasis *framework* COBIT 2019?
- b. Bagaimana tingkat kesiapan organisasi di *Diskominfo* Kota Bandung dalam melakukan transisi dari *framework* COBIT 5 ke COBIT 2019 untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)?
- c. Apa saja kesenjangan (gap) antara kondisi tata kelola TI saat ini di *Diskominfo* Kota Bandung dengan standar praktik yang diharapkan berdasarkan *framework* COBIT 2019?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk:

- a. Mengevaluasi tingkat *awareness* pegawai *Diskominfo* Kota Bandung terhadap prinsip dan praktik tata kelola TI berbasis COBIT 2019.
- b. Menilai kesiapan organisasi *Diskominfo* Kota Bandung dalam melakukan adopsi dan transisi *framework* dari COBIT 5 ke COBIT 2019.

- c. Mengidentifikasi kesenjangan tata kelola TI yang ada, serta memberikan rekomendasi perbaikan berbasis standar COBIT 2019 untuk mendukung efektivitas implementasi SPBE.

I.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada evaluasi tingkat *awareness* dan kesiapan organisasi Diskominfo Kota Bandung dalam mengimplementasikan *framework* tata kelola TI berbasis COBIT 2019 sebagai pengembangan dari COBIT 5. Fokus utama penelitian mencakup aspek pemahaman prinsip tata kelola TI, kesiapan transisi *framework*, serta identifikasi kesenjangan antara kondisi eksisting dengan standar tata kelola TI menurut COBIT 2019. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis spesifik seperti desain infrastruktur jaringan, pengembangan aplikasi, atau pengujian keamanan siber (tanpa implementasi teknis di lapangan). Data yang digunakan dalam penelitian meliputi literatur akademik terkait COBIT 5, COBIT 2019, dokumen regulasi SPBE, serta dokumen internal dari Diskominfo Kota Bandung terkait kebijakan dan pelaksanaan tata kelola TI. Analisis dalam penelitian ini dibatasi pada domain COBIT 2019 yang relevan dengan aspek *governance framework setting*, *stakeholder engagement*, *resource optimization*, dan *benefit delivery*. Batasan ini bertujuan untuk menjaga fokus penelitian agar tetap relevan, terarah, dan menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat tata kelola TI di lingkungan Diskominfo Kota Bandung.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian :

1. Bagi Diskominfo Kota Bandung. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran tentang tingkat *awareness* dan kesiapan organisasi dalam implementasi *framework* COBIT 2019. Hasil evaluasi dan rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu Diskominfo memperbaiki tata kelola TI, meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi, serta mendukung pencapaian target transformasi digital melalui SPBE.
2. Bagi Pemerintah Daerah. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah daerah lain dalam memahami pentingnya kesiapan organisasi dan *awareness* terhadap *framework* tata kelola TI. Hasil

penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk merancang strategi adopsi *governance framework* yang lebih efektif di sektor publik.

3. Bagi Peningkatan Layanan Publik. Implementasi tata kelola TI yang lebih baik di Diskominfo diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keandalan layanan publik berbasis elektronik di Kota Bandung. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah yang berbasis digital.
4. Bagi Peneliti dan Akademisi Lain. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi akademik dalam kajian pengembangan tata kelola TI di sektor publik, khususnya terkait transisi dari COBIT 5 ke COBIT 2019. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan memberikan inspirasi bagi studi lanjutan tentang implementasi *IT Governance* dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.